Kata Data, 4 November 2020

Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Lishia Erza
CEO, ASYX INTERNATIONAL
KOMITE KEWIRAUSAHAAN, APINDO UMKM/IKM
Finance & Digital Expert Partner, UKM Indonesia

@Kefirlime
@apindoumkm
@ukmindonesia



Lishia Erza

CEO, ASYX International
Komite Pengembangan Kewirausahaan, APINDO UMKM/IKM
Finance & Digital Partner, UKMIndonesia

S1 - HI UNPAR - Hypercompetition

S2 - Nottingham, Global & Social Justice, Biotechnology

S3 (Kandidat), Edinburgh, Social Exclusion & Disaster Management

LEMHANNAS - TAPLAI EO

Subject Matter Expert:

UNDP Partnership for Governance Reform, Indonesia

ADB - Sustainable Capacity Building for Decentralisation, Indonesia

UNDP Parliament, Turkey

Institute for International Health & Development, UK

Innovation Specialist:

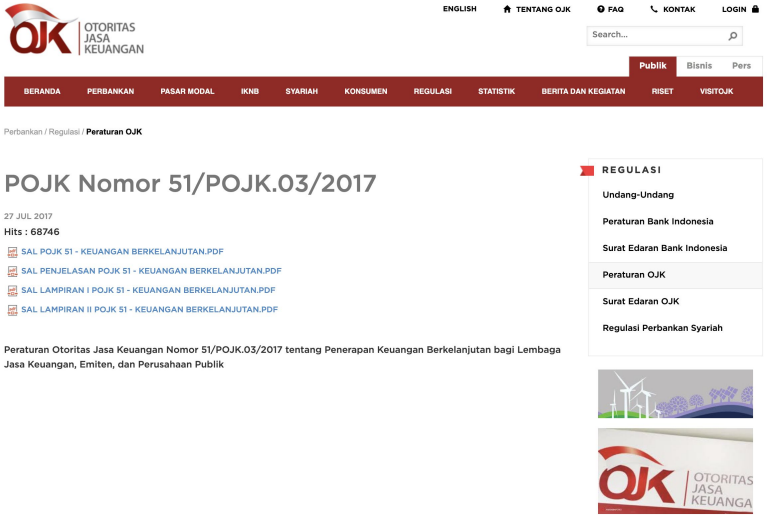
European Commission: Determination of Professional Qualifications for Healthcare Management Education (England, Scotland, Germany, Turkey)

Senior Management and Expert Positions:

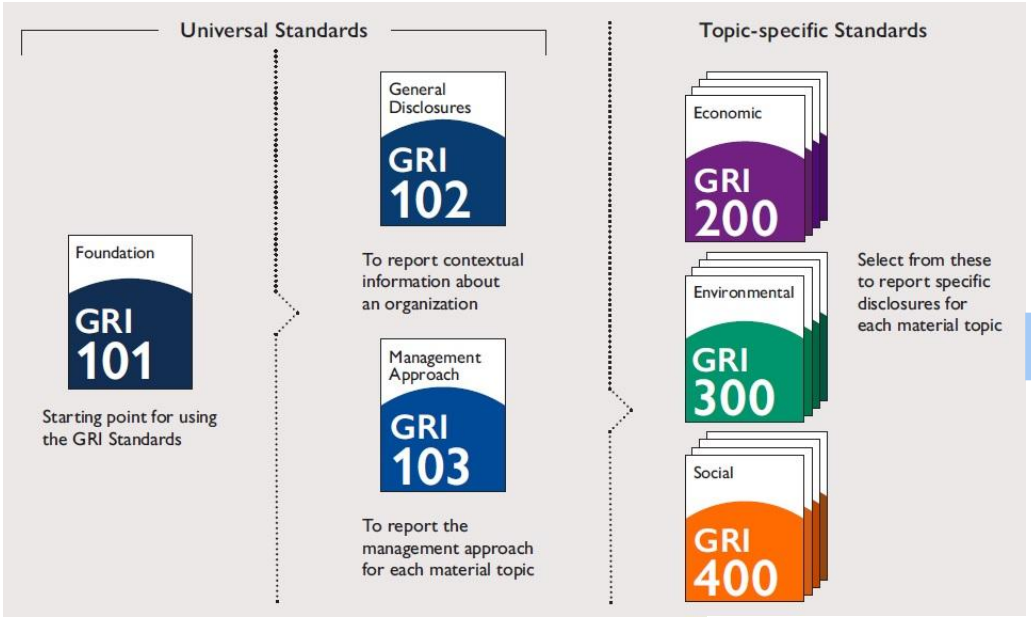
- Head of Asia Business, Tinopolis Group, UK
- Head of Asia Business, Sunset+Vine, UK
- Regional Account Director OMNICOM BlueCurrent APAC, Hong Kong
- CEO ASYX International
- Finance and Digital Partner - ukmindonesia.id

jika persyaratan investasi swasta di daerah bukan sekedar memperhatikan aspek ekonomi, melainkan juga aspek lingkungan dan sosial?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan).







GRI 301: Materials 2016	**GRI 305: Emissions 2016**
GRI 302: Energy 2016	**GRI 306: Effluents and Waste 2016**
GRI 303: Water and Effluents 2018	**GRI 307: Environmental Compliance 2016**
GRI 304: Biodiversity 2016	**GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016**

Isu - Isu ESG yg Menjadi pertimbangan Swasta



ENVIRONMENTAL

- climate change
- resource depletion
- waste
- pollution
- deforestation



SOCIAL

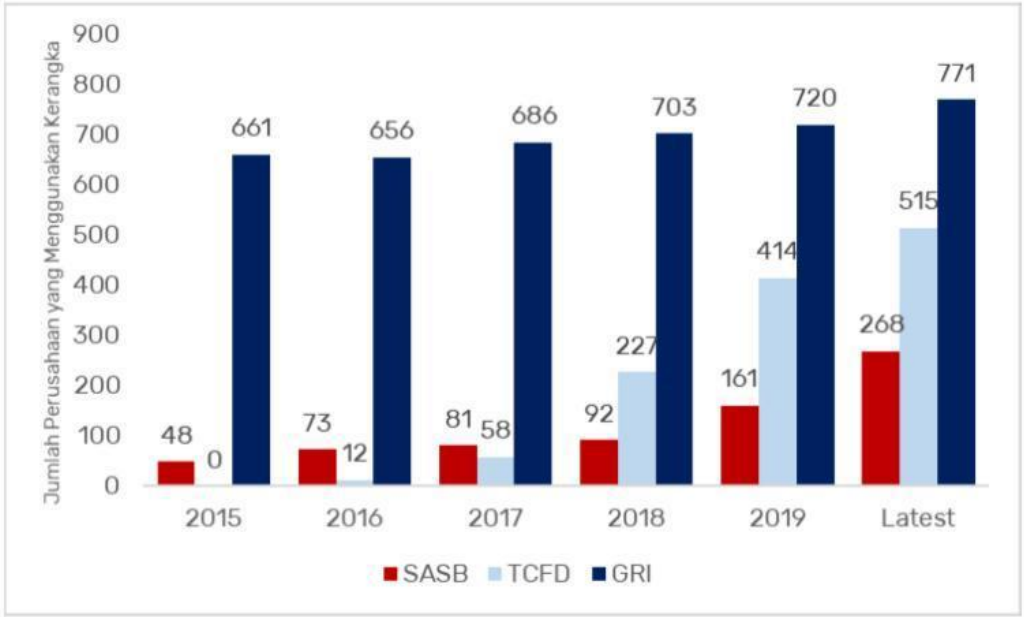
- human rights
- modern slavery
- child labour
- working conditions
- employee relations



GOVERNANCE

- bribery and corruption
- executive pay
- board diversity and structure
- political lobbying and donations
- tax strategy

Tren Penggunaan Kerangka Pelaporan ESG/SR di Indonesia



GRI : 4% CAGR 2016-Latest

TCFD : 156% CAGR 2016-Latest

SASB : 38% CAGR 2016-Latest

Source: GRI

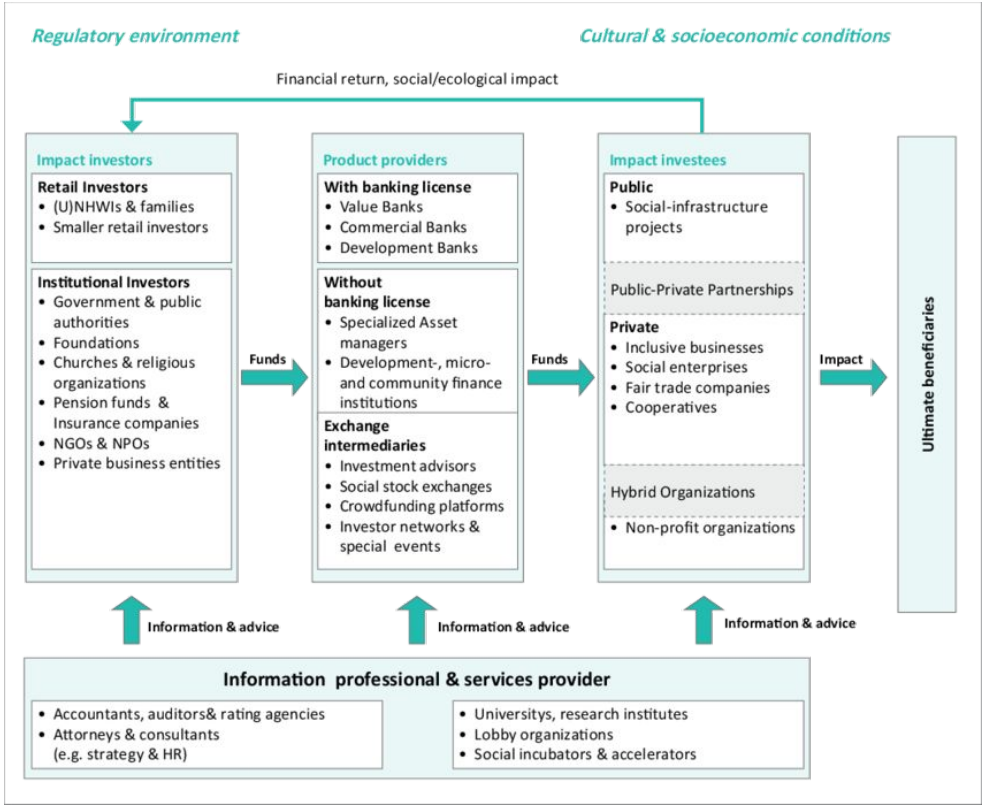
Seperti apa kontribusi dan dukungan swasta dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan?

Pembuatan Keputusan Investasi

CONSIDERING ESG ISSUES WHEN BUILDING A PORTFOLIO (known as: ESG incorporation)			IMPROVING INVESTEES' ESG PERFORMANCE (known as: active ownership or stewardship)	
ESG issues can be incorporated into existing investment practices using a combination of three approaches: integration, screening and thematic.			Investors can encourage the companies they are already invested in to improve their ESG risk management or develop more sustainable business practices	
Integration	**Screening**	**Thematic**	**Engagement**	**Proxy voting**
Explicitly and systematically including ESG issues in investment analysis and decisions, to better manage risks and improve returns.	Applying filters to lists of potential investments to rule companies in or out of contention for investment, based on an investor's preferences, values or ethics	Seeking to combine attractive risk return profiles with an intention to contribute to a specific environmental or social outcome. Includes impact investing.	Discussing ESG issues with companies to improve their handling, including disclosure, of such issues. Can be done individually, or in collaboration with other investors.	Formally expressing approval or disapproval through voting on resolutions and proposing shareholder resolutions on specific ESG issues.

Bentuk-bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemda, swasta dan masyarakat sipil lainnya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan?

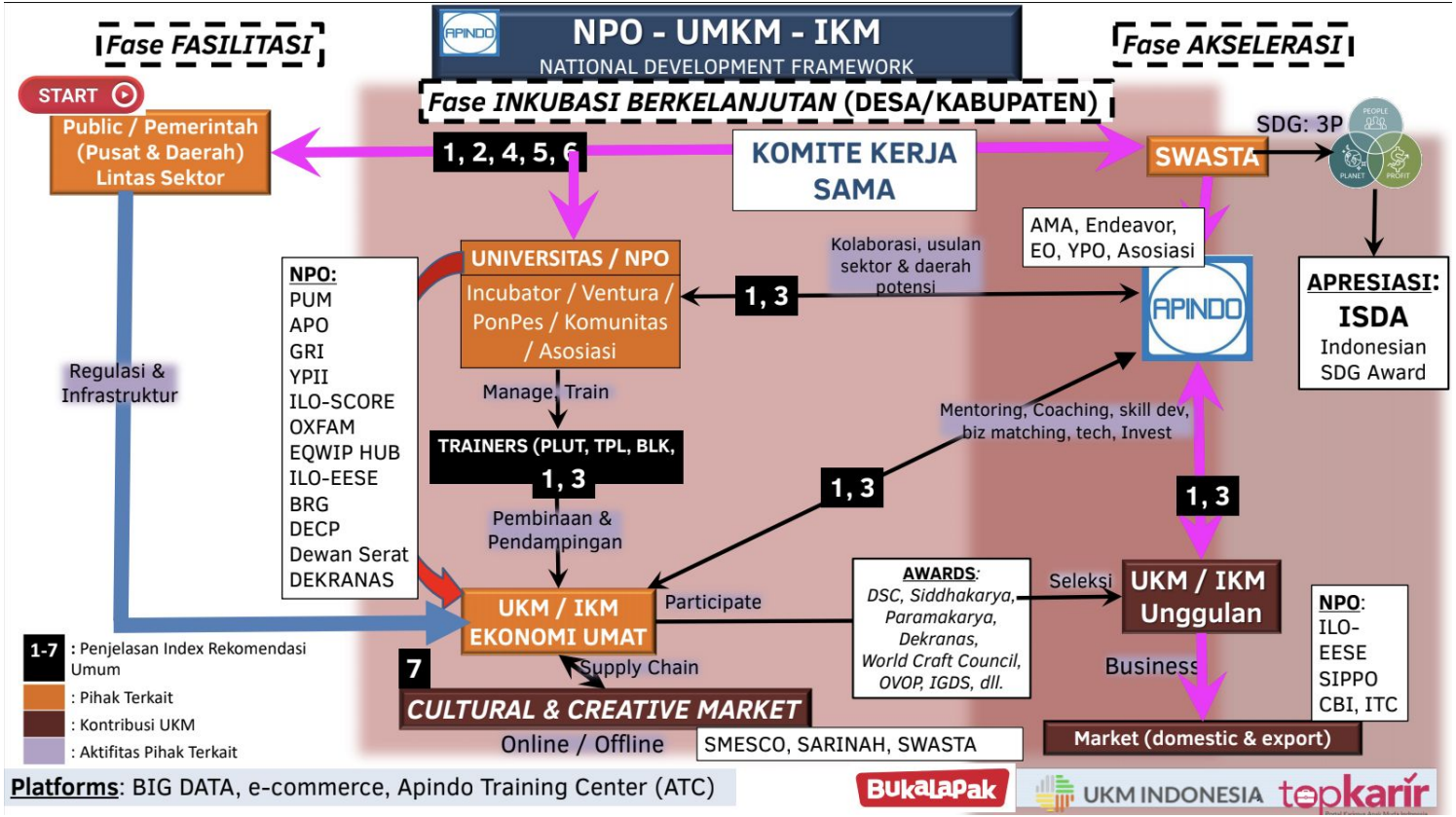
Saat ini: Kerangka Responsible Investments

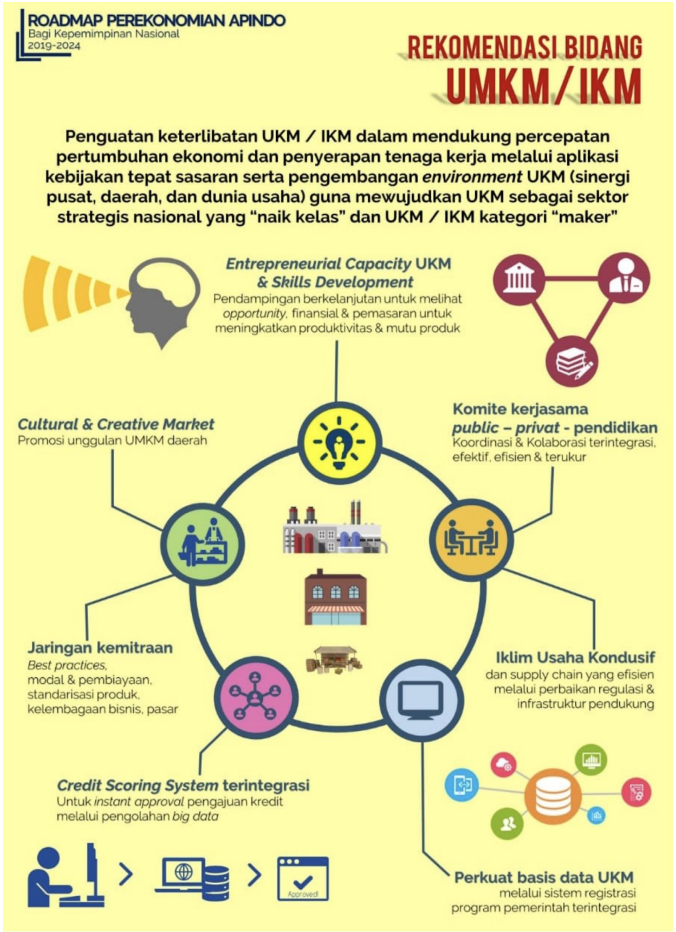




Lütjens-Schilling, Lena & Scheck, Barbara. (2015).

Kerangka Pengembangan UMKM/IKM APINDO





1. Meningkatkan **kapasitas kewirausahaan** individu pelaku UMKM (entrepreneurial capacity) melalui penguatan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kolaboratif berbagai pemangku kepentingan, melalui dukungan koordinasi pemerintah.
2. **Penguatan jaringan kemitraan** untuk memperluas akses informasi, best practices / pengetahuan, modal dan pembiayaan, standardisasi produk, kelembagaan bisnis, serta pasar bagi UMKM.
3. Meningkatkan kapasitas pekerja sektor UKM melalui program **intensifikasi dan ekstensifikasi skills development** untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produknya.
4. Memperbaiki **regulasi dan infrastruktur pendukung** untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan rantai pasok yang efisien.
5. Membentuk **Komite Kerjasama** Publik–Swasta–Pendidikan (Riset dan Teknologi) sebagai media koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral resmi terkait pembinaan dan pendampingan UMKM.
6. Memperkuat **basis data UMKM** melalui sistem registrasi program-program pemerintah yang terintegrasi.
7. Adanya sebuah **acuan Credit Scoring System** (CSS) yang terintegrasi untuk dapat dilakukan instant approval atas suatu pengajuan kredit, dapat mengolah keseluruhan data2 tersebut dalam big data dengan menggunakan AI, sehingga output yg dihasilkan oleh sistem dari waktu ke waktu akan semakin akurat.

Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan:

1. Data
2. Koordinasi
3. Paham Ekosistem

Kata Data, 4 November 2020

Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Lishia Erza
CEO, ASYX INTERNATIONAL
KOMITE KEWIRAUSAHAAN, APINDO UMKM/IKM
Finance & Digital Expert Partner, UKM Indonesia

@Kefirlime
@apindoumkm
@ukmindonesia

